

FINANCIAL STATEMENTS DISCLOSURE: SATU TINJAUAN KEUANGAN DAERAH

Yusron Difinubun^{1*}, Annisa Khaerani^{2*}, Uswatul Fajar^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas
Pendidikan Muhammadiyah Sorong

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris pengaruh parsial antara tingkat kekayaan daerah, total aset daerah, terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Penarikan hipotesis penelitian menggunakan basis teori agensi dan teori signal, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder hasil akses data dalam publikasi. Menggunakan teknik statistik deskriptif dan Regresi linear berganda berbantuan SPSS 25.0 untuk analisis data. Selain itu dalam menjaga normalitas dan mencegah hetersokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Penelitian berlokasi di Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel tingkat kekayaan daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah aset berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Tingkat Kekayaan Daerah, Jumlah Aset, Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah.

Corresponding Author at Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Jl KH. Ahmad Dahlan, No. 1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong.
E-mail address: yusronalid@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Urusan pemerintah sebagian dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Urusan pemerintah yang pada saat sebelum reformasi sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintah tersebut dilimpahkan ke daerah. Pengalihan ini juga berdampak pada pengalihan anggaran untuk pemenuhan urusan tersebut dari pusat ke daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diikuti dengan reformasi keuangan. Reformasi keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit (Hilmi and Martani 2012).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tahun 2010 dinyatakan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membantu pengambilan keputusan. Pentingnya mengungkapkan semua informasi bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan (Bandariy 2012). Dengan demikian akan memperjelas bahwa laporan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan yang ada, tetapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahaminya.

Salah satu tujuan penyediaan informasi dalam laporan keuangan adalah untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat (Fajarudin 2021). Dalam konsep pedoman kebijakan *governance* dinyatakan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan dan penyediaan informasi menjadi unsur yang penting dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengungkapkan berbagai informasi dalam laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan publik (Setyowati 2016).

Aktivitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah sangat penting untuk diperhatikan agar pemerintah dapat memahami dengan baik prolemtika kinerja daerah yang terjadi seperti dalam temuan penelitian kami terdudulu terkait kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari keuangan daerah (Difinubun and Gudono 2021).

Hasil laporan keuangan pemerintah yang telah disusun harus mengikuti PSAP yang berlaku, kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)(Setyowati 2016). Laporan keuangan yang diaudit harus dilampiri dengan pengungkapan, karena laporan keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan juga dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal(Setyowati 2016).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum ada yang mengungkapkan secara penuh, yaitu rata-rata sebesar 30,85%(Suhardjanto and Yulianingtyas 2011), 35,45% (Martani dan Lestiani, dalam (Rahim et al. 2020)), dan 40% (Muqorrobin, dalam (Yulianti and Gamayuni 2018)).(Ratnasari 2016) menunjukkan tingkat rata-rata pengungkapan yaitu 51,56%, (Setyowati 2016), menunjukkan tingkat rata-rata pengungkapan yang lebih tinggi yaitu 64%. Hasil pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terbilang masih rendah, membuat peneliti ingin

menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada LKPD. Pengungkapan LKPD yang terbilang rendah ini juga berpengaruh pada opini audit yang diberikan oleh BPK, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah masih belum taat terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan fenomena dan adanya inkonsistensi penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaruh tingkat kekayaan daerah, dan total aset daerah, terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan.

.LITERATUR REVIEW

Agency Theory

Menurut Zimmerman (1977) dalam (Setyowati 2016) *agency problem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai *principles* memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agen*, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut *principles* karena menggantikan peran rakyat, namun dapat juga dipandang sebagai *agen* karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Implikasi dari teori ini, *principles* baik rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada *agen* baik pemerintah maupun para politisi. Politisi sebagai *principles* juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Signalling Theory

Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987 dalam (Setyowati 2016)). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

Keuangan Pemerintah Daerah

Reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya tiga buah paket undang-undang pada tahun 2003 dan 2004. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan dasar dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan di Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit (Hilmi and Martani 2012). Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagai perintah teknis dari Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, perintah teknis tersebut diturunkan dari UU 17 2003, UU 1 2004, UU 15 2004, UU 23 2014 jo UU 32 2004, UU 33 2004 yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Difinubun and Gudono 2021).

Hipotesis

Pengaruh tingkat kekayaan terhadap pengungkapan laporan keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh (Ingram 1984),(Laswad, Fisher, and Oyelere 2005), serta Liestiani dalam (Hilmi and Martani 2012) juga menemukan bahwa kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang sama yaitu semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan sehingga kekayaan daerah meningkat dapat meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan.

$H_1 =$ Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

Pengaruh total aset terhadap pengungkapan laporan keuangan

Aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Aset yang dimiliki juga dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Tetapi, jumlah aset yang besar sering menjadi kendala dalam melaporkan laporan keuangan bagi pemerintah di Indonesia karena belum semua aset yang dimiliki pemerintah dicatat dengan baik. Sehingga semakin besar jumlah aset semakin sulit dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Retina dalam (Ramdhani 2016) menunjukkan bahwa jumlah aktiva berkorelasi negatif tetapi dengan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

$H_3 =$ Total aset berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan

METODE PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan range (Imam Ghozali 2011). *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik dalam setiap variabel agar lebih mudah memahami pengukuran pada variabel yang diungkap (Sugiono 2014).

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan persamaan (Ghozali 2016):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Tingkat Pengungkapan
a	=	Konstanta
b ₁ , b ₂	=	Koefisien regresi berganda (<i>multiple regression</i>)
X ₁	=	Kekayaan daerah
X ₂	=	Total Aset
e	=	<i>Error term</i>

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam. Ghozali 2011).

Uji t

Menurut (Imam. Ghozali 2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 (α=5%). Suatu hipotesis dapat ditolak atau diterima dengan melihat kriteria sebagai berikut: Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig<0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig>0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menerangkan/mendeskripsikan setiap informasi yang diperoleh dari hasil olahan data berupa angka-angka. Analisis deskriptif penelitian ini bahwa persentase maksimum untuk tingkat kekayaan daerah (TKD) yaitu 2,2 juta sedangkan persentase minimumnya yaitu 7,6 juta. Untuk Persentase maksimum total aset (TA) yaitu Rp. 9,5 milyar, Sedangkan persentase minimum Rp. 1,6 milyar. Sementara Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan daerah (TP-LK). nilai minimal TP-LK yaitu 100% pengungkapan, sedangkan nilai minimum TP-LK yaitu 0% (nol persen)

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 5.11 Persamaan Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-1.824	.414	
	TKD	.052	.030	.225
	TA	-.076	.068	-.348

Sumber: *Output SPSS, 2022*

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = -1,824 + 0,052(TKD) - 0,076(TA)$$

Hasil Pengujian Parsial

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independet* (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika t-hitung > dari t-tabel atau Sig < α maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya Jika t-hitung < dari t-tabel atau sig > α maka hipotesis yang diajukan ditolak.

Tabel 5.12 Hasil Pengujian Parsial
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-4.402	.000
	TKD	1.722	.040
	TA	-1.121	.267

a. Dependent Variable: TP-LK

Sumber: Output SPSS, 2018

Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa variabel Total Aset (TA) (X3) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah (TP-LK). Pendapat ini dikonfirmasi dengan hasil hitung yakni nilai t-hitung < t-tabel atau Sig>0,05 yaitu 0,267. Sedangkan variabel Tingkat Kekayaan daerah (TKD) (X1), terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah (TP-LK). Pendapat ini dibuktikan dengan besaran nilai t-hitung > t-tabel atau Sig<0,05 yaitu 0,04(TKD). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hipotesis 1, dan 2, terdukung.

Hasil Pengujian Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Adapun digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.704 ^a	.496	.449	.22891

a. Predictors: (Constant), JT, TA,

b. Dependent Variable: TP-LK

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, *R square* yang diperoleh sebesar 0,496 yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah (TP-LK) (Y) dapat mampu dijelaskan oleh variabel Tingkat Kekayaan daerah (X1), dan Total Aset daerah (X2). Dengan kata lain variabel bebas (X) memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel (Y).

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan

Tingkat Kekayaan Daerah (TKD) secara sederhana diartikan sebagai besaran kekayaan daerah dalam satu periode. Perhitungan tingkat kekayaan menggunakan pembagian antara Total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa tingkat kekayaan daerah (TKD) memiliki koefisien positif. Hal ini berarti bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dengan kata lain, besar kecilnya besar kecilnya tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap ada atau tidaknya pengungkapan laporan keuangan. Sementara itu, berdasarkan hasil uji signifikansi diketahui bahwa tingkat kekayaan daerah (TKD) memiliki pengaruh

signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pendapat ini berarti bahwa tingkat kekayaan daerah merupakan faktor penentu ada dan tidaknya pengungkapan laporan keuangan. Hasil signifikan yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada 24 kabupaten kota di provinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena tingkat kekayaan daerah merupakan sumberdaya daerah yang multak di untkapkan dalam laporan keuangan.

Hasil ini sesuai dengan teori agensi, bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah diikat oleh mandat rakyat. Pemerintah memiliki keluasaan untuk mengelola negara namun berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Sedangkan masyarakat memiliki kuasa mengawasi pemerintah daerah, jika terdapat kesalahan pengelolaan maka masyarakat berhak mengintervensi secara langsung. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan masyarakat membuka ruang asimetris informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Untuk dapat meminimalisir ruang asimetris informasi diperlukan adanya pengungkapan atas tingkat kekayaan daerah melalui laporan keuangan. Relevansi hasil ini sesuai pula dengan teori sinyal, secara tegas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan mandat rakyat sudah selayaknya melakukan pengungkapan yang memadai atas tingkat kekayaan daerah dalam laporan keuangan guna menjaga sinyal positif (kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintah sebagai penanggungjawab pelayanan publik. Semakin baik tingkat pengungkapan kekayaan daerah dalam laporan keuangan dan informasi terkait tingkat kekayaan daerah dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat, maka tingkat kepercayaan (sinyal positif) masyarakat terhadap pemerintah akan semakin baik.

Hasil penelitian ini searah temuan penelitian terdahulu oleh (Ingram 1984) menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Penelitian (Laswad et al. 2005), serta Liestiani dalam (Hilmi and Martani 2012) menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah berhubungan positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Pengaruh Total Aset Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan

Total Aset Daerah (TA) secara sederhana diartikan keseluruhan aset pemerintah daerah yang dihitung dalam satuan uang. Perhitungan total aset dilakukan dengan menghitung total aset pemerintah yang dilaporkan dalam laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa total aset daerah (TA) memiliki koefisien negatif. Hal ini berarti bahwa total aset daerah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin besar total aset maka tingkat pengungkapan aset pada laporan keuangan semakin rendah.

Sementara itu, berdasarkan hasil uji signifikansi diketahui bahwa total aset daerah (TA) memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Pendapat ini berarti bahwa total aset belum sepenuhnya dapat diungkapkan dalam pengungkapan aset pada laporan keuangan. Tidak signifikan hasil temuan ini disebabkan karena masih lemahnya proses pengungkapan pemerintah daerah berkaitan dengan total aset pemerintah yang sebenarnya dalam laporan keuangan.

Hasil ini sesuai dengan teori agensi, bahwa total aset merupakan bagian dari bentuk pengungkapan pada laporan keuangan. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan masyarakat membuka ruang

asimetris informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Untuk dapat meminimalisir ruang asimetris informasi diperlukan adanya pengungkapan atas total aset melalui laporan keuangan. Jika dalam pengungkapan aset daerah dalam laporan ditemukan adanya ketidaksesuaian maka pemerintah wajib melakukan perbaikan pada periode selanjutnya.

Relevansi hasil ini sesuai pula dengan teori sinyal, secara tegas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan mandat rakyat sudah selayaknya melakukan pengungkapan yang memadai atas total aset daerah dalam laporan keuangan guna menjaga sinyal positif (kepercayaan) masyarakat terhadap pemerintah sebagai penanggungjawab pelayanan publik. Proses pengungkapan aset yang tidak sesuai akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan (sinyal negatif) masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retina dalam (Ramdhani 2016), dalam temuannya diketahui bahwa jumlah aktiva berkorelasi negatif tetapi dengan kualitas pengungkapan laporan keuangan secara keseluruhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan penelitian sebagai berikut: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Total aset daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dapat dijelaskan dengan tingkat kekayaan daerah, dan total asset, sebesar 49,6%. Sedangkan 49,4% lain dapat ditindaklanjuti menggunakan variabel lain sebab tidak dapat dijelaskan menggunakan variabel penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: Disarankan kepada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih memperhatikan total aset daerah, Semakin buruk pengungkapan total aset dalam laporan keuangan akan semakin negatif kinerja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan temuan negatif antara total aset terhadap tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah. Disarankan kepada kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Selatan untuk memperhatikan tingkat kekayaan daerah. Hal ini penting karena dapat berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah yang baik dalam laporan keuangan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain guna memenuhi selisih uji determinasi penelitian yaitu 49,4%. Selain itu diperlukan memodifikasi metode analisis dan mengganti objek penelitian, untuk dapat memastikan konsistensi hasil temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandariy, Himmah. 2012. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas)." *Jurnal Eprints.Undip* 8(2):1–28.
- Difinubun, Y., And M. Gudono. 2021. "Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Provinsi" *Fair Unimuda* 1(1):62–80.

- Fajarudin. 2021. "Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* 1(1):662–71.
- Ghozali, I. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariate Ibm Spss." *Semarang, Universitas Diponegoro* 105.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19 (Edisi Kelima)." *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss* (1996):160.
- Ghozali, Imam. 2011. "Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Undip." *Analisis Multivariate Dengan Program Spss* 103.
- Hilmi, Amiruddin Zul, And Dwi Martani. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi." *Simposium Nasional Akuntansi Xv* 1–26.
- Ingram, Robert W. 1984. "Economic Incentives And The Choice Of State Government Accounting Practices." *Journal Of Accounting Research* 22(1):126. Doi: 10.2307/2490704.
- Laswad, Fawzi, Richard Fisher, And Peter Oyelere. 2005. "Determinants Of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities." *Journal Of Accounting And Public Policy* 24(2):101–21. Doi: 10.1016/J.Jaccpubpol.2004.12.006.
- Rahim, Syamsuri, Hamzah Ahmad, Muslim Muslim, And Andi Nursadirah. 2020. "Disclosure Of Local Government Financial Statements In South Sulawesi."
- Ramdhani, Dadan. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Propinsi Banten." *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 9(2). Doi: 10.35448/Jrat.V9i2.4301.
- Ratnasari, Ayu Dewi. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Ri Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Periode 2012-2014)." *Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 1(1):1–25.
- Setyowati, Lilis. 2016. "Determinan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Esensi* 6(1):45–62. Doi: 10.15408/Ess.V6i1.3120.
- Sugiono, P. D. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.Pdf." *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* 12.
- Suhardjanto, Djoko, And Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia)." *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8:30–42.
- Yulianti, Fegy, And Rindu Gamayuni. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia.*